

RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN

2022



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Renja Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja PD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan Renja RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Kelanjutan dengan telah tersusunnya dokumen Renja PD ini, dapat dilihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Tarempa, 11 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



SAHTIAR, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740311 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	19
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	20
III.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Renstra PD sehingga Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

“KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERAH”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA DAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI LUHUR;
2. MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKEADILAN;

3. PELAYANAN PRIMA MELALUI REFORMASI BIROKRASI;
4. MEMPERKUAT PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI;
5. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terawal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Awal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi PemutAWalan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, Mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568).
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

I.3. MAKSLUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 mempunyai maksud, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan Sekretariat Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2030;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2026.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pada Tahun Anggaran 2025, APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 60.135.291.521 dengan 3 (Tiga) program dan 17 (Tujuh Belas) kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.139.272.849,00 atau 75,06% dari keseluruhan rencana anggaran. Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2026

No	Program	No	Kegiatan
1 -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		9	Penataan Organisasi
		10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11	Administrasi Tata Pemerintahan
		12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	14	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		15	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		16	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		17	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tabel 2.2 Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026**Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah**

Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Tahun 2026
1	2	3	4
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,601,289,097.61
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	27,309,660,784.25
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26,981,971,284.25

4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327,689,500
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,156,635,401
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80,330,210

4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	145,966,538
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	44,436,810
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,599,997,992
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	89,747,900
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	719,918,951
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,476,237,000

4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,948,494,036
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4,948,494,036
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,702,089,743
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89,331,977
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,406,599,014
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	206,158,752
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658,277,288
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	172,170,000

4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	113,150,000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	372,957,288
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	669,884,958
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	230,000,000
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	119,884,958
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	528,161,950
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	181,961,950

4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	164,250,000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	181,950,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tertatanya Penataan Organisasi	484,526,563.36
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	177,200,753.76
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	171,084,035
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	136,241,774.60
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,143,558,374
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1,122,787,011
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	580,422,870

4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	440,348,493
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,772,452,498.47
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	304,403,135
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	204,257,135
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100,146,000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9,545,860,090.47
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6,397,294,207.69
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3,148,565,882.78
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Hukum	922,189,273

4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	440,303,700
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	365,969,573
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	115,916,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan	1,695,014,470.72
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	532,413,186
4.01.03.2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	371,435,059
4.01.03.2.01.00 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	160,978,127
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	283,796,470.72
4.01.03.2.02.00 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	20,555,001.72

4.01.03.2.02.00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	200,602,170
4.01.03.2.02.00 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	62,639,299
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	711,984,814
4.01.03.2.03.00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	304,999,000
4.01.03.2.03.00 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247,861,000
4.01.03.2.03.00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	159,124,814
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam	166,820,000
4.01.03.2.04.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	30,890,000
4.01.03.2.04.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan	

		Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30,750,000
4.01.03.2.04.00 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	105,180,000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan Awal untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030. Visi yang harus didukung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 adalah :

“KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Sekretariat Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG INOVATIF DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG AGAMIS, BERBUDAYA DAN MENGEDEPANKAN NILAI- NILAI LUHUR.
2. MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKEADILAN.
3. PELAYANAN PRIMA MELALUI REFORMASI BIROKRASI.
4. MEMPERKUAT PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
5. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah, yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Implementasi e-Governance
		Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah
		Terbangunnya role model bagi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
		Terwujudnya sistem pelaporan kinerja keuangan yang akuntabel
2	Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya aparatur pemerintah daerah pada setiap unit level pemerintahan	Tewujudnya data kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya jiwa nasionalisme aparatur

3	Meningkatnya kualitas produk - produk	Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk - produk perencanaan daerah dalam mendorong prioritas daerah
---	---------------------------------------	--

	perencanaan dan kebijakan daerah	Tercapainya Koordinasi perencanaan pembangunan daerah lokasi prioritas di KKA
		Tersusunnya perundangan daerah yang harmonis
		Terwujudnya kebijakan daerah dalam peningkatan pembangunan daerah
		Tercapainya perencanaan dan kerjasama pemerintah daerah dengan Stakeholder, BUMD dan Pelaku Usaha Masyarakat
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tersusunnya dan terlaksananya standar pelayanan oleh OPD
		Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan
		Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
5	Menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari - hari	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan umat
		Meningkatnya aktifitas penyuluhan agama yang berbobot dan mencerahkan
		Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan

III.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan Sekretariat Daerah lebih menitikberatkan pada terselenggaranya Pemerintahan yang baik sebagai upaya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sistematis. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Sekretariat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu “ Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Sebagai Fondasi Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan”.

Sebaran lokasi dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di ibukota Kabupaten, ini dikarenakan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah penetap Kebijakan dan membidangi urusan Pemerintahan Umum. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif, Lokasi, dan Kelompok Sasaran

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (2026)	Lokasi Kegiatan	Kelompok Sasaran
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.01.2.02					
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	26,981,971,284.25	KKA	ASN SETDA
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	327,689,500	KKA	ASN SETDA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	0	KKA	ASN SETDA
4.01.01.2.06					
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	80,330,210	KKA	OPD
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	145,966,538	KKA	OPD
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	44,436,810	KKA	OPD
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	1,599,997,992	KKA	OPD
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket	89,747,900	KKA	OPD
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	719,918,951	KKA	Masyarakat

4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	1,476,237,000	KKA	ASN
4.01.01.2.07					
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15 Unit	4,948,494,036	KKA	OPD
4.01.01.2.08					
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	89,331,977	KKA	OPD
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10 Laporan	1,406,599,014	KKA	OPD
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Laporan	206,158,752	KKA	OPD
4.01.01.2.09					
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	172,170,000	KKA	OPD
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	113,150,000	KKA	OPD
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	372,957,288	KKA	OPD
4.01.01.2.11					
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan	230,000,000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket	119,884,958	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	20.000.000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	300.000.000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.12					
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0 Paket	181,961,950	KKA	KEPALA DAERAH

4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0 Paket	164,250,000	KKA	KEPALA DAERAH
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5 Paket	181,950,000	KKA	OPD
4.01.01.2.13					
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen	177,200,753.76	KKA	ASN
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan	171,084,035	KKA	OPD
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	136,241,774.60	KKA	OPD
4.01.01.2.14					
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	10 Laporan	1,122,787,011	KKA	ASN
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	580,422,870	KKA	ASN
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	30 Laporan	440,348,493	KKA	ASN
4.01.02					
4.01.02.2.01					
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	15 Dokumen	204,257,135	KKA	OPD
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	100,146,000	KKA	OPD
4.01.02.2.02					
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	6,397,294,207.69	KKA	MASYARAKAT
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	20 Dokumen	3,148,565,882.78	KKA	MASYARAKAT
4.01.02.2.03					
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	20 Dokumen	440,303,700	KKA	OPD

4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	365,969,573	KKA	OPD
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20 Dokumen	115,916,000	KKA	OPD
4.01.03					
4.01.03.2.01					
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	371,435,059	KKA	OPD
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	160,978,127	KKA	OPD
4.01.03.2.02					
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	20 Dokumen	20,555,001.72	KKA	OPD
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	200,602,170	KKA	OPD
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan	62,639,299	KKA	OPD
4.01.03.2.03					
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	304,999,000	KKA	OPD
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen	247,861,000	KKA	OPD
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	15 Orang	159,124,814	KKA	OPD
4.01.03.2.04					
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10 Dokumen	30,890,000	KKA	OPD
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10 Dokumen	30,750,000	KKA	OPD

4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	10 Dokumen	105,180,000	KKA	OPD
TOTAL			Rp.55,068,756,066.8		

Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, juga berkomitmen dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Sekretariat Daerah berkomitmen terhadap penerapan PUG dengan memberikan akses, peran/partisipasi, control dan manfaat antara laki – laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kesenjangan / bias gender. Sejumlah aktivitas yang mencerminkan penerapan PUG diantaranya adalah dengan memberikan proporsi keterwakilan laki – laki dan perempuan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi
2. Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh

- Kabupaten/Kota Sehat

Perwujudan kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat dilakukan dengan menitik beratkan pada capaian indikator kegiatan KKS. Indikator – indikator kegiatan KKS tersebut tidak di alokasikan secara khusus tetapi lebih bersifat menumpang pada kegiatan yang ada, namun secara substansi, indikator – indikator tersebut harus termuat dalam kegiatan – kegiatan perangkat daerah. Sehubungan dengan tatanan KKS, dimana salah satunya adalah sarana dan prasarana umum, Sekretariat Daerah juga telah menerapkan wilayah kantor Sekretariat Daerah sebagai daerah bebas asap rokok sebagaimana Peraturan Bupati No. 49 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.

- Kabupaten Layak Anak (KLA)

Perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA) dilakukan dengan memperhatikan sistem pembangunan yang berbasiskan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak. Sekretariat Daerah berupaya dalam proses perencanaan pembangunan terkait terhadap pencapaian indikator KLA. Salah satu yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah Pengadaan Alat Bermain Anak-anak di Taman Bermadah, sebagai fasilitas untuk bermain bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Dalam penerapan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah berupaya agar setiap program/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat di pertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat. Sebagaimana di atur oleh permendagri 86 tahun 2017 pasal 170 ayat 2 bahwa sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian SAKIP Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah melalui bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan bersama inspektorat dan Balitbangpeda dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupaya agar mempedomani sasaran Renstra PD, agar setelah RKT tersusun, perjanjian kinerja kepala OPD dapat legal formalkan serta di jabarkan oleh unit kerja dibawahnya dalam menterjemahkan capaian yang diperjanjikan.

- Sustainable Developmen Goals (SDGs)

Berkenaan dengan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Daerah juga telah berupaya dengan memuat tujuan dan indikator SDGs. Sejumlah tujuan SDGs menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, salah satu upaya dalam pencapaian tujuan SDGs

adalah pengurangan tingkat kemiskinan meskipun tanpa pengangguran khusus, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dengan penerapan zakat profesi pegawai, pembayaran zakat, infaq, dan sodakoh yang dihimpun UPZ diharapkan mampu memberikan keringanan bagi asnaf penerima ZIS. Sekretariat Daerah berkeyakinan bahwa jika budaya ini di lakukan secara masif, maka akan berdampak signifikan kepada penurunan angka kemiskinan.

Meskipun ada beberapa tanpa penganggaran kegiatan khusus, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah diupayakan dalam pencapaian target SDGs, KLA, PUG, KKS dan AKIP. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, kedepannya Sekretariat Daerah akan melakukan perbaikan – perbaikan dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar target – target yang ingin di capai dapat tercapai sebagaimana mestinya.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat,.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/ kegiatan Sekretariat Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 11 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



SAHTIAR, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740311 200212 1 005